

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, anggota Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia, Jawa Timur menjadi salah satu pimpinan terbesar di Indonesia dibuktikan dengan banyaknya amal usaha baik dari bidang pendidikan, kesehatan maupun bidang sosial. Sejak kelahirannya Muhammadiyah tidak memiliki hubungan organisatoris dengan partai politik tertentu namun disisi lain Muhammadiyah juga bukan anti politik, Muhammadiyah mengambil kontribusi politiknya sebagai pembina masyarakat dan berperan aktif sebagai fungsi kritik terhadap negara (Syahputra, 2014). .

Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat yang tidak pernah mendirikan partai politik maupun berafiliasi dengan partai politik tertentu hingga saat ini, akan tetapi Muhammadiyah juga tidak berhasrat untuk membatasi warganya untuk berhasrat politik. Meskipun Muhammadiyah menyatakan sikap non-partisan dalam berpolitik justru Muhammadiyah lebih aktif dalam menjalankan peran-peran politiknya. Sikap Muhammadiyah yang membebaskan kadernya untuk berpolitik ini dapat tercermin dari banyaknya kader Muhammadiyah yang berdiaspora dengan berbagai elemen politik praktis, kader-kader Muhammadiyah tidak berkerumun dalam satu parpol, justru mereka menyebar ke berbagai parpol, relasi politik yang menggurita ini menjadikan Muhammadiyah secara organisasi mempunyai suatu kekuatan politik yang kongkrit untuk terus menjadi organisasi sosial yang mempunyai peran politik yang kuat (Mubarak, 2012). Begitu pula apabila ada kader yang mengajukan diri sebagai caleg. Muhammadiyah justru sangat mendukung, sekaligus menganjurkan warganya sendiri untuk lebih memilih caleg-caleg yang dari latar belakang Muhammadiyah. Muhammadiyah juga tidak berlebihan jika melabuhkan harapan kepada kader-kadernya tersebut (Notonegoro, 2023).

Sebelum pembahasan lebih mendalam bagaimana politik di Muhammadiyah maka perlu dijelaskan terkait *hard politics* dan *soft politics*. Politik praktis (*hard politics*) merupakan politik yang berorientasi pada kekuasaan formal atau kekuasaan pemerintahan dimana biasa dilakukan melalui jembatan partai politik,

Politik moral (*soft politics*) merupakan politik yang bergerak tidak atas dasar kepentingan kekuasaan pemerintah akan tetapi mempunyai kerangka untuk mempengaruhi kebijakan umum dari luar pemerintahan. Pada konteks politik Muhammadiyah bukanlah suatu organisasi politik praktis, akan tetapi menariknya Muhammadiyah banyak bersinggungan dengan politik baik politik yang bersifat *soft politics* maupun *hard poitics* (Argenti, 2017).

Muhammadiyah mempunyai dinamika yang kompleks dalam menyikapi politik, salah satu landasan Muhammadiyah adalah Khittah Denpasar yang isinya bahwa berpolitik praktis itu penting dan mulia namun harus dalam wadah yang digunakan harus proposional. Berikut ini adalah salah satu poin dalam Khittah Denpasar :

Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek ajaran Islam dalam urusan keduniawian yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan politik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara. (Khittah Denpasar)

Muhammadiyah sudah pernah ikut serta pada kontestasi politik pada pemilihan DPD-RI 2014, hal tersebut dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (PWM DIY) yang mengusung nama M. Afnan Hadikusumo. Dalam dinamika komunikasi didalamnya banyak menjadi gejolak baik di internal Muhammadiyah maupun dengan golongan-golongan lainnya. Meskipun pada ahirnya M. Afnan Hadikusumo berhasil masuk ke kursi DPD-RI, terdapat dinamika elit Muhammadiyah dimana ada beberapa elit yang tidak setuju dengan memasukkan kader ke kursi DPD-RI meskipun tidak banyak (Masduki, 2014).

Warga Muhammadiyah dalam memandang politik praktis terdapat dua golongan yaitu Skriptualis-Rasional, dimana Muhammadiyah menarik diri dari hal yang berhubungan dengan politik praktis, golongan ini lebih berfokus pada gerakan yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan dan sosial, dalam hal pemerintahan memilih pada sikap oposisi. Golongan yang kedua adalah Substansialis-Pragmatis, pada golongan ini berfikir bahwa kader muhammadiyah harus aktif dalam politik praktis, bahkan jika perlu memasukkan kader sebanyak-

banyaknya ke dalam parpol agar turut aktif menjadi aktivis politik (Hamdi, 2023). Gerakan politik Muhammadiyah merupakan gerakan moral, bukan gerakan politik secara praktis, dukung-mendukung, meminta jabatan, bahkan menyebabkan Muhammadiyah menjadikan basis massa terhadap suatu golongan atau partai tertentu, kemudian gerakan moral ini dikembangkan oleh lembaga khusus untuk menangani masalah politik yaitu Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) (Syahputra, 2014).

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menangani atau mengkaji berbagai isu nasional atau kebijakan nasional yang menyangkut masyarakat banyak, hal ini dilatarbelakangi berkembangnya partisipasi aktif dan peran warga Muhammadiyah dalam berdinamika kebangsaan. LHKP bergerak dalam menyusun tentang panduan politik yang islami yang didasarkan nilai-nilai dan prinsip kebangsaan yang di rumuskan Muhammadiyah, dalam melangsungkan tujuan tersebut ada beberapa aksi yang dilakukan yaitu seperti melakukan pendidikan politik dan Pendidikan Kewarganegaraan yang sudah dikembangkan oleh universitas Muhammadiyah serta menyelenggarakan pendidikan kader politik untuk mendorong partisipasi yang lebih luas di lembaga pemerintah (lhkp.muhammadiyah.or.id)

Ketua LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan bahwa dengan banyaknya warga Muhammadiyah yang cukup besar ini mempunyai pengaruh dalam keberpihakan pada proses pemilu oleh karena itu mengkapitalisasi suara warga Muhammadiyah untuk mensukseskan kemenangan pemilu perlu dilakukan. Dari pernyataan tersebut maka dibuatlah kebijakan satu dapil satu kader Muhammadiyah namun bagaimana cara Muhammadiyah menentukan caleg yang akan mendapatkan suara warga Muhammadiyah tidak semata-mata mudah dari banyaknya warga Muhammadiyah tentu yang akan mencalonkan lebih dari satu orang, maka Muhammadiyah menentukan kriteria-kriteria calon yang pantas memperoleh suara Muhammadiyah terutama dapil Jawa Timur, tidak hanya karena kedekatan kultural atau emosional, tetapi harus dikaji berdasarkan data yang dihimpun dengan baik (Nizar, 2023). Salah satu contoh komitmen program satu dapil satu kader Muhammadiyah di Jawa Timur adalah tercerminkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sampang, Madura. wujud dari komitmen tersebut

dengan diadakanya Sosialisasi Satu Dapil Satu caleg KaderMu. Dalam agenda tersebut juga turut menghadirkan sejumlah tim sukses (timses) Caleg KaderMu yang diusung oleh PDM Sampang, seperti timses Caleg DPR RI nomor urut 2 dari PAN Malik Effendi, timses Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur nomor urut 1 dari PAN Mochammad Aziz, timses DPD RI nomor urut 5 Agus Rahardjo, serta sejumlah Caleg KaderMu di tingkat Kabupaten/Kota. Dengan adanya kegiatan tersebut merupakan wujud Jihad Politik Muhammadiyah (Nizar, 2023).

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyelenggarakan konsolidasi nasional pada Maret 2018, acara tersebut dimaksudkan untuk menyambut agenda Pemilihan Umum 2019, dalam forum tersebut menghasilkan sebuah keputusan yaitu dicetuskannya Jihad Politik Muhammadiyah atau Jipolmu. Realisasi dari Jipolmu ini Muhammadiyah akan mendorong kader yang mempunyai kapasitas di bidang politik untuk berkontestasi dalam pemilu legislatif 2019. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP. Muhammadiyah kembali mengadakan kegiatan serupa pada 16-18 Maret 2023 untuk menyongsong pemilu 2024. Sebagai bentuk Implementasi Jipolmu ini Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur membentuk tim Jipolmu dari tingkat wilayah sampai tingkat Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) (Yandi, 2023).

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur untuk mensukseskan jihad politik 2024 membentuk tim adhoc Jipolmu #2 sebagai tim taktis untuk mengawal visi dan misi dakwah parlemen Muhammadiyah di dalam politik (Nizar, 2023). Tugas Dari jipolmu merupakan untuk mengawal mensukseskan kebijakan satu dapil satu kader Muhammadiyah, selain hal itu hal ini juga menghindari ketidaknetralan Muhammadiyah dalam pemilihan umum 2024. Dari proses kebijakan hingga terbentuknya tim Jipolmu dalam menyikapi adanya Pemilu 2024 merupakan buah dari struktur yang terbentuk di Muhammadiyah yaitu dengan adanya Khittah Ponorogo 1969, Khittah Ujung Pandang 1971, Khittah Surabaya 1978, dan kompilasi terakhir ialah Khittah Denpasar 2002. Kemudian tak terlepas juga dengan peran-peran individu di dalamnya, seperti para pimpinan dan juga warga Muhammadiyah yang lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana peranan Agen dan Struktur bekerja dalam Strategi Jihad politik Muhammadiyah (Jipolmu) untuk memenangkan calon legislatif kader Muhammadiyah dalam Pemilu 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan agen dan struktur bekerja dalam strategi Jihad Politik Muhammadiyah (Jipolmu) Jawa Timur untuk memenangkan calon legislatif kader Muhammadiyah dalam Pemilu 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pengetahuan pada keilmuan sosiologi terutama di bidang politik.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan pada penelitian selanjutnya dengan tema yang sama yaitu tentang Sosiologi Politik, terutama pada bidang yang sama terkait strategi politik dalam ormas utamanya dalam kemenangan calon tertentu.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Manfaat Bagi Objek Penelitian

Diharapkan adanya penelitian ini dapat membuka pandangan-pandangan baru pada objek penelitian dan menjadi evaluasi bagi objek penelitian terkhusus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

- b. Manfaat Bagi Pembaca dan Masyarakat Umum

diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagaimana hegemoni bekerja dalam Pemilu. serta dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat umum dalam menanggapi politik di Indonesia